

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dari ekonomi pertanian berawal pada tahun 1960 yang dalam prosesnya memberikan dampak pada hubungan sosial berupa produksi yang dinamis serta keterkaitannya dengan adanya kebutuhan dasar serta juga kepentingan dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Hal tersebut juga menawarkan perbedaan antara zaman lampau dan modern dalam pembentukan dan perkembangan pertanian. Secara garis besar memberikan perkembangan ekonomi yang signifikan yakni adanya unsur modern melalui jalur pertanian dan produksi pertanian yang berbeda di waktu dan tempat yang berbeda menurut Bernstein (2015). Kondisi lingkungan yang terjadi pada saat ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, urbanisasi, reformasi kebijakan, teknologi, keterkaitan global, restrukturisasi industri makanan dan perubahan iklim maka membutuhkan sebuah transformasi pertanian. Adanya komersialisasi dapat mencapai tujuan ini dengan mengubah praktik produksi saat ini dari tingkat yang sangat subsisten menuju tingkat yang sangat berorientasi pada pasar (World Bank, 2007; Barret et. al., 2012)

Pertanian sebagai sektor penting di negara berkembang dan bercorak agraris seperti Indonesia merupakan salah satu sektor penyangga yang berperan cukup besar dalam pembangunan nasional, yakni melalui perannya seperti sebagai salah satu pembentuk dari Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional, penyediaan lapangan kerja, menjadi sumber penerimaan bagi masyarakat, serta berperan pada proses produksi beberapa produk pertanian terutama penyediaan pangan, kegiatan ekspor, industri pakan, dan bahan baku industri lainnya (Rusono et. al., 2013). Pelaksanaan pembangunan sektor pertanian menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya bertujuan untuk mencapai sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. Terkait dengan hal ini, salah satu pengukuran yang digunakan adalah indeks nilai tukar petani (NTP). Nilai tukar petani dapat memberikan gambaran dari daya tukar pada produk pertanian yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dengan barang dan jasa (Aulia et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut

Kementerian Pertanian (2019) peningkatan kesejahteraan terhadap petani juga merupakan salah satu program penting pada pembangunan pertanian sebagai jalan untuk mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Pada dasarnya di Indonesia tingkat kesejahteraan dari petani telah ditentukan diukur dari besaran Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), tingkat kemiskinan dan *gini ratio* di perdesaan.

Badan Pusat Statistik melakukan pembagian nilai tukar petani (NTP) dalam beberapa subsektor yakni tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, perikanan, dan peternakan. Pada penelitian ini, penulis meneliti terkait petani tanaman pangan maka digunakanlah indikator dari nilai tukar petani dari subsektor tanaman pangan, dimana pada subsektor tersebut memiliki cakupan yang terdiri dari komoditas pertanian tanaman pangan seperti padi dan palawija. Subsektor tanaman pangan adalah subsektor yang berfungsi sebagai penyedia dari bahan-bahan pokok yang menjadi makanan utama sebagai konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Pada subsektor tanaman pangan, komoditas penyumbang terbesar yakni terdapat pada komoditas padi, dikarenakan sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani padi dan mengingat beras sebagai hasil olahan padi, merupakan bahan makanan pokok yang sering menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Menurut hasil dari Sensus Pertanian Tahun 2013 pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwasannya sebagian besar dari lahan pertanian sektor tanaman pangan berada di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan angka luas lahan sawah tanaman pangan yang lebih tinggi daripada pulau lainnya di Indonesia (BPS, 2013).

Tabel 1.1
Luas Lahan Sawah Tanaman Pangan di Indonesia (Ha), Tahun 2013

Pulau/Kepulauan	2013	Persentase
Sumatera	2.242.108	27,64%
Jawa	3.231.377	39,83%
Bali & Nusa Tenggara	500.509	6,17%
Kalimantan	1.067.187	13,15%
Sulawesi	994.293	12,26%
Maluku & Papua	76.629	0,95%
Indonesia	8.112.103	100%

Sumber : BPS (2013)

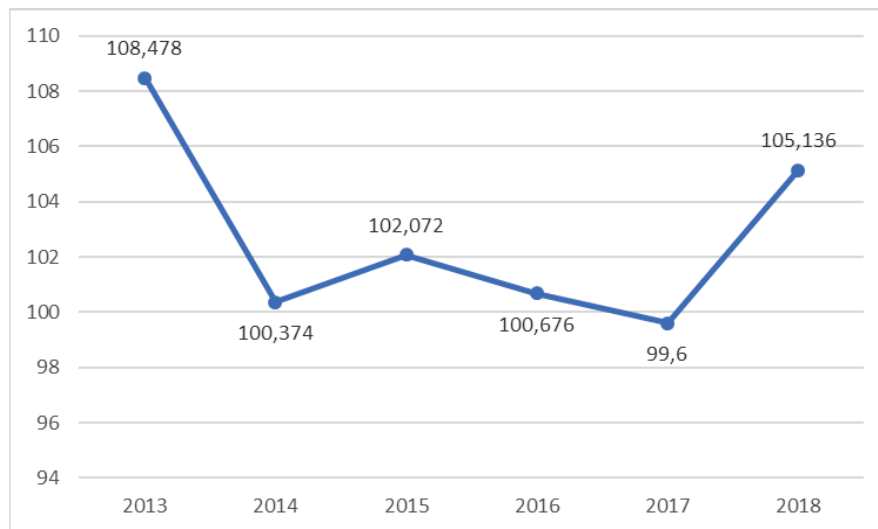
Menurut Kementerian Pertanian (2018) Angka konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2018 mencapai sekitar 97,05 kg/kapita/tahun. Pada urutan kedua komoditas penyumbang terbesar produksi tanaman pangan yakni komoditas jagung. Konsumsi jagung di Indonesia termasuk tinggi di bawah konsumsi beras sebagai bahan pokok. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya industri peternakan, dimana komoditas jagung menjadi komponen utama yakni dengan mencakup sekitar 60% kebutuhan pada sektor pakan. Sebagian besar hasil produksi jagung bahkan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri menjadi penopang utama dari industri pakan, dibandingkan dengan konsumsi pangan langsung yang persentasenya hanya 30%, dan sisanya sebagai kebutuhan bibit dan industri lainnya. Berdasarkan angka tersebut, membuat peran jagung menjadi berubah yakni lebih kepada pendukung bahan baku untuk kebutuhan industri dibandingkan sebagai bahan pangan (Kasryno et. al, 2007).

Produksi padi dan produksi jagung secara nasional, sebagian besar ditopang oleh hasil produksi dari pertanian di Pulau Jawa. Berdasarkan jumlah produksi dan luas lahan panen padi, beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi daerah lumbung padi nasional. Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi yang menduduki peringkat teratas secara nasional dalam hal luas dan produksi panen padi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2018), Provinsi Jawa Timur memiliki luas lahan padi 1.821,98 Hektare dengan jumlah produksi padi 10.499.588 Ton, lalu Provinsi Jawa Tengah memiliki luas lahan padi 1.751,19 Hektare dengan jumlah produksi padi 10.203.213 Ton, dan Provinsi Jawa Barat memiliki luas lahan padi 1.707,25 Hektare dengan jumlah produksi 9.647.359 Ton, kemudian untuk komoditas jagung, luas lahan panen di Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan dengan luas lahan panen di luar Pulau Jawa. Menurut data dari Kementerian Pertanian (2014) luas lahan panen jagung di Pulau Jawa mencapai 50,93%, sedangkan sisanya 49,07% berada di luar dari Pulau Jawa. Hal ini membuktikan bahwa pertanian jagung sebagian besar masih berada di Pulau Jawa.

Indikator pertanian penting lainnya selain dari luas lahan dan jumlah produksi yaitu angka produktivitas lahan yang dihasilkan dari komoditas pertanian. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) menjelaskan bahwa produktivitas lahan adalah ukuran dari jumlah output yang dihasilkan oleh sejumlah lahan tertentu.

Sebagian besar dapat diterapkan dalam konteks produksi tanaman, tetapi juga dapat digunakan pada produksi ternak dalam kasus-kasus tertentu, Pengukuran produktivitas lahan pertanian dihitung dengan membagi produksi tanaman dengan jumlah lahan yang dilakukan penanaman, maka hasilnya menjadi sebuah satuan yakni jumlah produksi per luas lahan, seperti kuintal/hektar (FAO, 2019).

Pulau Jawa yang didukung beberapa provinsi yang termasuk menjadi daerah lumbung padi dan mampu menghasilkan hingga mencapai 50% produksi nasional (BPS, 2018). Hasil capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian sangat penting terutama tanaman pangan pada perekonomian di Pulau Jawa. Hal itu didukung oleh beberapa provinsi dengan produksi lebih dari 10 juta ton tiap tahunnya, provinsi tersebut yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain menjadi daerah lumbung padi, ketiga provinsi tersebut juga memiliki hasil produksi jagung yang besar, dimana angka produksinya melebihi 1 juta ton tiap tahunnya. Akan tetapi, pada angka produktivitasnya tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan pada tiap provinsi. Berbeda dengan angka produktivitas jagung yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada setiap provinsinya.



Gambar 1.1
Rerata Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Pulau Jawa (Indeks), 2013-2018

Sumber : BPS (2018)

Berdasarkan dari data yang tertera pada sebelumnya yaitu meskipun hasil produksi, angka produktivitas padi, dan produktivitas jagung menunjukkan jumlah yang cukup besar, tidak secara langsung membuat kehidupan petani menjadi lebih sejahtera ataupun stabil. Hal ini terlihat juga pada Gambar 1.1 dimana menunjukkan data terkait nilai tukar petani subsektor tanaman pangan yang merupakan *proxy* indikator kesejahteraan petani, data tersebut menunjukkan kondisi yang fluktuatif bahkan terjadi penurunan di beberapa tahun. Pada tahun 2017 indeks nilai tukar petani tanaman pangan di Pulau Jawa secara rata-rata menunjukkan angka defisit atau di bawah dari angka 100 yang merupakan ukuran indeks yang digunakan yakni 99,6.

Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan (NTPTP) di Pulau Jawa. Setiap daerahnya memiliki angka yang bervariasi, baik dari daerah utama sebagai sentra produksi tanaman pangan ataupun yang bukan menjadi sentra produksi tanaman pangan. Hal ini memungkinkan untuk dikaji dan dilakukan analisis terkait apakah terdapat variabel yang dapat memberikan pengaruh pada nilai tukar petani subsektor tanaman pangan di setiap daerah tersebut. Menurut Tambunan (2003) pada setiap daerah perbedaan nilai tukar petani dapat terjadi karena adanya perbedaan seperti pada tingkat inflasi, perbedaan titik ekuilibrium pasar komoditas pertanian, sistem distribusi pupuk, dan juga berbagai input pertanian lainnya. Oleh karena itu adanya tingkat inflasi pada setiap provinsi yang memiliki persentase berbeda antara satu sama lain akan berdampak dalam perbedaan indeks nilai tukar petani.

Inflasi sebagai salah satu variabel makro pada perekonomian, serta merupakan variabel makro penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Hubungan yang terjadi terkait pembangunan sektor pertanian dan inflasi menurut Norton et al., (2010: 365) adanya kebijakan moneter dalam mengendalikan tingkat inflasi secara tidak langsung akan memberikan bantuan perencanaan dalam pembangunan ekonomi sektor pertanian, yaitu pengendalian tersebut akan lebih merangsang pangsa pertanian yang dapat memberikan tambahan *share* terhadap produk domestik bruto dan juga harga input dan output sektor pertanian yang lebih baik bagi petani. Selain variabel tingkat inflasi, terdapat variabel makro lain yang turut memberikan pengaruh terhadap nilai tukar petani, yakni variabel pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah memiliki tingkat yang berbeda dan terkait dengan kinerja perekonomian pada masing-masing daerah tersebut, terdapat tren yang fluktuatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi tersebut. Akan tetapi perbedaan tingkat pertumbuhannya masih relatif stabil di antara angka 5-6%. Menurut pernyataan dari Samuelson (2009: 370) terdapat tolak ukur pada kinerja perekonomian, tolak ukur yang sering digunakan adalah produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu negara tertentu, atau dapat dijelaskan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, meskipun menjadi salah satu pulau dengan produksi pangan terbesar di Indonesia tidak secara langsung memberikan kehidupan yang sejahtera bagi para petani tanaman pangan. Rata-rata nilai tukar petani subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa cenderung memiliki angka yang berfluktuatif tiap tahunnya, bahkan di beberapa provinsi masih di bawah angka 100 pada indeks nilai tukar petani. Menurut Syekh (2013) kemampuan bayar dari petani ataupun tingkat pendapatan riil petani secara tidak langsung dapat ditunjukkan dengan kondisi fluktuasi nilai tukar petani. Selain itu, menurut Timmer et al., (1984), kegiatan pertanian juga terpengaruh oleh sesuatu yang terjadi di luar dari perihai yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, dengan demikian nilai tukar petani juga dipengaruhi oleh kondisi dan perilaku yang terjadi di luar sektor pertanian. Perbaikan dan peningkatan nilai tukar petani yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan petani, secara tidak langsung berhubungan dengan usaha petani untuk melakukan kegiatan produksi lebih baik lagi. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat petani yang masih belum sejahtera. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis memiliki sebuah tujuan untuk melakukan analisis terkait determinan yang mempengaruhi nilai tukar petani subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa yang terdiri dari produktivitas padi, produktivitas jagung, tingkat inflasi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat sejumlah peneliti yang turut melakukan penelitian tentang nilai tukar petani. Terutama penelitian terkait determinan yang mempengaruhi nilai tukar petani. Lingkup penelitian pada topik ini lebih banyak terdapat pada daerah di Indonesia baik

secara skala nasional maupun skala provinsi dan kabupaten. Penelitian tersebut terdapat berbagai perbedaan seperti penggunaan variabel independen, sumber data ataupun hasil penelitian diantara penelitian satu dengan yang lainnya. Hasil perbedaan tersebut dapat terjadi juga karena adanya perbedaan dalam segi karakteristik daerah, struktur ekonomi, ataupun arah kebijakan pembangunan daerah tersebut.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama yakni meliputi, (1) Melakukan analisis dari determinan yang terdiri dari produktivitas padi, produktivitas jagung, tingkat inflasi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi, apakah berpengaruh terhadap nilai tukar petani tanaman pangan di Pulau Jawa, (2) Menguji determinan tersebut apakah berpengaruh secara signifikan positif ataupun negatif terhadap nilai tukar petani subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa.

1.3 Kontribusi Riset

1. Memberikan kontribusi bagi pembaca dan peneliti lainnya dalam keterkaitannya dengan penelitian tentang nilai tukar petani.
2. Memberikan kontribusi kepada pemerintah dan juga pembuat kebijakan mengenai pentingnya nilai tukar petani yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani.
3. Memberikan referensi dan literatur tambahan untuk penelitian terkait nilai tukar petani yang akan datang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguji determinan yang terdiri dari produktivitas padi, produktivitas jagung, tingkat inflasi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap nilai tukar petani subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini melakukan penyusunan sistematika penulisan yang terdiri dari dari lima bab yang disusun dengan kaidah-kaidah penulisan penelitian ilmiah. Bab 1 pendahuluan yakni menjelaskan terkait latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, kontribusi riset (*novelty*), tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka yaitu menjelaskan landasan teori, dimana dapat berasal dari hasil

penelitian sebelumnya yang berguna untuk memberikan dasar penyelesaian terkait masalah penelitian hingga dapat menyusun hipotesis. Bab 3 metode penelitian yakni memberikan penjelasan terkait pendekatan yang digunakan dalam penelitian, pemilihan model empiris, jenis hingga sumber data, definisi operasional variabel, serta penjelasan tentang teknik analisis yang diterapkan. Bab 4 hasil dan pembahasan yaitu membahas terkait gambaran umum dari penelitian, lalu deskripsi statistik, serta intepretasi dan pembahasan dari hasil estimasi. Bab 5 kesimpulan dan saran yakni berupa kesimpulan, lalu saran yang berguna untuk pihak terkait, serta keterbatasan penelitian.